PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum yang formal terhadap penyelenggaraan tempat parkir kendaraan umum, tempat parkir kendaraan khusus dan tempat parkir kendaraan insidentil dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk alat perlengkapan yang diparkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang tempat parkir kendaraan, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1989, perlu untuk ditinjau kembali dan atau diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 - 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 9. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERU-BAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN.

ነ

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1975 Nomor : HK/66/954/SK, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Nomor 3-P/Hkm/IV/1975 tanggal 30 April 1975 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 4 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 293/P tahun 1983 tanggal 28 September 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B tahun 1983 Seri B;
- b. Nomor 13 tahun1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 180/P tahun 1990 tanggal 15 Mei 1990 dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1990 Seri B ; diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 12 : Dihapus ;
- B. BAB VI A dan Pasal 14 A, diubah dan harus dibaca :

BAB VI A

KETENTUAN PEMYIDIKAN

Pasal 14 A

- (1) Salain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menyakan surat izin dan 🗈 atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - q. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat beita acara setiap tindakan tentang ;
 - a. pemeriksaan rumah ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1992 Nomor 395/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 3/A tahun 1993 Seri A pada tanggal 29 Juli 1993.

> An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cab. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241

55 AT ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum yang formal, terhadap penyelenggaraan tempat parkir kendaraan umum, tempat parkir kendaraan kendaraan khusus dan tempat parkir kendaraan insidentil dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk alat perlengkapannya yang diparkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1989, yang ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubhan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-00000-